Pengembangan Pariwisata Kampuang Sarugo (Saribu Gonjong) dalam Perspektif Community Based Tourism (CBT) di Provinsi Sumatera Barat

[1]Tisra Aulia, [2]Meyzi Heriyanto, [3]Hasim As'ari
[123]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Korespondensi : tisra.aulia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya pariwisata di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama melalui pendekatan Community Based Tourism (CBT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan pariwisata Kampuang Sarugo dalam perspektif CBT dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif eksplanatif, dengan data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan ketua Pokdarwis, pemerintah nagari, tokoh adat, pelaku usaha wisata seperti homestay dan kuliner, serta masyarakat umum. Dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip struktural Pokdarwis, data kunjungan wisatawan, dan catatan sejarah desa wisata turut menjadi bagian penting dalam penguatan data penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Kampuang Sarugo telah mencerminkan prinsip utama CBT. Masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan berbagai kegiatan wisata, mulai dari pengoperasian homestay Rumah Gadang, penyediaan kuliner tradisional, hingga pelaksanaan atraksi budaya seperti randai, talempong, dan edukasi adat. Aktivitas wisata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama perempuan dan pemuda, sekaligus mendorong pelestarian budaya Minangkabau. Meskipun demikian, penelitian menemukan masih adanya beberapa kendala seperti keterbatasan akses jalan, kapasitas SDM Pokdarwis yang belum merata, tantangan dalam pengelolaan promosi digital, serta kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial budaya dari kedatangan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kampuang Sarugo memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju, namun membutuhkan penguatan manajemen dan pendampingan berkelanjutan

***Kata kunci** : pengembangan pariwisata, community based tourism.*

Abstract

This research was motivated by the development of tourism in Indonesia, which places the community as the main driver through the Community-Based Tourism (CBT) approach. This study aims to explain the development of tourism in Kampuang Sarugo from a CBT perspective and identify the obstacles encountered in the process. The approach used is explanatory qualitative, with data obtained through direct observation in the field, interviews with the head of Pokdarwis, the village government, traditional leaders, tourism business actors such as homestays and culinary businesses, and the general public. Documentation in the form of photos of activities, Pokdarwis structural archives, tourist visit data, and historical records of the tourist village are also important parts of strengthening the research data. The results of the study show that the development of tourism in Kampuang Sarugo has reflected the main principles of CBT. The community is involved in planning, management, and various tourism activities, ranging from operating the Rumah Gadang homestay, providing traditional cuisine, to performing cultural attractions such as randai, talempong, and traditional education. Tourism activities provide economic benefits to the community, especially women and youth, while encouraging the preservation of Minangkabau culture. However, the study found that there are still several obstacles, such as limited road access, uneven capacity of Pokdarwis human resources, challenges in digital promotion management, and community concerns about the socio-cultural impact of tourist arrivals. These conditions indicate that Kampuang Sarugo has great potential for further development, but requires strengthened management and continuous assistance.

***Keyword:** tourism development, community based tourism*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan wisata dan budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi alam dan keberagaman budaya di setiap daerah memungkinkan Indonesia terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi lokal di era global. Pengembangan kawasan wisata dapat terjadi secara alami maupun melalui inisiatif masyarakat, namun pemerintah perlu bergerak cepat agar masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang ada (Anwar et al., 2021).

Pariwisata memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk ekonomi, sosial budaya, lingkungan, serta peningkatan kesempatan kerja. Pada negara berkembang, pariwisata menjadi instrumen pembangunan yang tidak membutuhkan investasi besar karena daya tarik wisata sudah tersedia. Kepariwisataan juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan penerimaan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta mempromosikan budaya (Arjana, 2020).

Secara ekonomi, pariwisata memengaruhi pertumbuhan melalui berbagai jalur, seperti peningkatan devisa, pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan sektor lain, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan efek *positive economies of scale*. Selain nilai ekonomi, pariwisata juga memperkuat nilai sosial budaya, identitas masyarakat, wawasan, hubungan antarbangsa, serta mendorong konservasi alam dan peningkatan kualitas lingkungan.Menurut Tapatfeto dalam (Hanafi & As'ari, 2023) sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu sektor unggulan dalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja maupun dalam pengentasan kemiskinan.

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam pengembangan pariwisata. Mengacu pada Sherry R. Arnstein, partisipasi dapat memperluas pengetahuan, meningkatkan representasi, membangun komunikasi yang transparan, serta mengatur hubungan kekuasaan antar pemangku kepentingan. Jika tidak direncanakan dengan baik, pembangunan pariwisata dapat berdampak negatif, sehingga perlu berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan faktor produksi lokal.

Pengembangan pariwisata saat ini banyak berfokus pada desa wisata, sejalan dengan Nawa Cita poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Pengembangan desa wisata memerlukan kolaborasi pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang masih kuat, lingkungan yang relatif alami, dan peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Namun terdapat hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata, kualitas SDM, serta infrastruktur yang terbatas. Menurut Barreto dan Giantari (2015), pengembangan pariwisata adalah mengembangkan atau mempromosikan objek wisata untuk menarik wisatawan dan menjadikan atraksi tersebut lebih baik dan lebih menarik dari segi lokasi dan objek.

Salah satu provinsi dengan potensi besar adalah Sumatera Barat, yang memiliki kekayaan wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner. Dengan pemanfaatan potensi tersebut, Sumatera Barat dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Sumatera Barat memiliki banyak desa wisata dengan karakter alam dan budaya yang kuat. Nagari Alahan Panjang terkenal dengan dataran tinggi, perkebunan teh, kebun sayur, dan panorama Danau Diatas–Danau Dibawah. Nagari Tuo Pariangan menonjol dengan rumah adat Minangkabau asli dan lanskap Gunung Marapi yang menjadi pusat kebudayaan Minang. Nagari Painan menawarkan pesona pantai seperti Pantai Carocok dan Bukit Langkisau, serta peninggalan sejarah Benteng Batu Kalang. Sementara itu, Desa Madobak di Mentawai dikenal dengan budaya suku Mentawai, tato tradisional, serta hutan tropis yang masih alami.

Salah satu desa wisata unggulan lainnya adalah Desa Wisata Kampuang Sarugo di Kabupaten Lima Puluh Kota. Desa ini memiliki kekayaan budaya Minangkabau yang masih terjaga, pemandangan alam perbukitan yang indah, serta suasana pedesaan yang autentik. Kearifan lokal tetap dipertahankan, seperti kewajiban setiap suku memiliki Rumah Gadang yang menghadap matahari terbit atau Masjid Raya. Wisatawan juga dapat mempelajari seni randai dan talempong pacik yang dilestarikan oleh generasi muda.

Perkembangan pariwisata turut mengubah fungsi Rumah Gadang yang tidak hanya sebagai tempat tinggal dan upacara adat, tetapi juga sebagai daya tarik wisata dan potensi homestay. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan dukungan melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Kampuang Sarugo semakin dikenal melalui liputan media nasional seperti Trans7 dalam program Jejak Petualang dan Si Bolang, serta GTV, MNC TV, dan Indosiar. Desa ini juga pernah menjadi lokasi syuting film Begadang Rendang.

Dalam konteks kebijakan, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengembangan destinasi harus berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan SDM, pemanfaatan teknologi, dan tanggung jawab terhadap kekayaan alam dan budaya. Dengan demikian, pengelolaan destinasi seperti Kampuang Sarugo harus dilakukan secara optimal agar tujuan pembangunan tercapai.

Kampuang Sarugo juga memiliki nilai sejarah penting. Desa ini pernah menjadi tempat tinggal Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara selama masa mempertahankan kemerdekaan, dan beberapa peninggalan sejarah masih terawat, termasuk Rumah Juang PDRI (Sindonews, 2020). Pengembangan desa wisata ini mulai berjalan sejak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat memetakan potensinya pada 2019 dan kemudian menjalin komunikasi dengan masyarakat, pemerintah nagari, dan pemerintah kabupaten untuk meresmikan Kampuang Sarugo sebagai desa wisata (Bakaba, 2020).

Langkah dari pengembangan pariwisata ini mencakup beberapa fase, mulai dari inisiasi komunitas yang organik, penguatan kelembagaan melalui kolaborasi multipihak, hingga inovasi strategis yang memadukan budaya, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Fase pertama yaitu transisi dari masyarakat agraris ke pengakuan potensi wisata (Pra-2019). Sebelum tahun 2019, masyarakat Kampuang Sarugo menjalani kehidupan agraris dengan komoditas utama berupa jeruk. Pada puncak kejayaannya di awal 2000-an, perkebunan jeruk mendominasi ekonomi lokal. Namun, seiring waktu, tantangan seperti serangan hama lalat buah, kenaikan biaya produksi, dan pandemi COVID-19 pada 2021 menyebabkan penurunan drastis pada hasil panen. Kondisi ini menjadi katalisator bagi masyarakat untuk mencari alternatif ekonomi baru. Meskipun memiliki kekayaan budaya berupa deretan rumah gadang dengan atap gonjong yang khas, yang juga memiliki nilai historis sebagai bagian dari PDRI, serta berbagai kesenian tradisional, potensi ini belum digarap secara terorganisir.

Fase yang kedua, inisiasi dan pembangunan pondasi pariwisata (2019-2020). Perjalanan transformatif dimulai pada tahun 2019, saat inisiatif swadaya masyarakat yang didukung oleh pendampingan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhasil membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari mengandalkan komoditas tunggal menjadi diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata. Melalui musyawarah, disepakati nama Kampuang Saribu Gonjong yang disingkat Sarugo, yang secara metaforis berarti surga, mencerminkan keindahan dan kekayaan adat desa. Pada fase ini, Pokdarwis mulai aktif mengidentifikasi dan merumuskan strategi untuk mengemas daya tarik budaya, sejarah, dan alam yang dimiliki desa, termasuk cerita di balik setiap rumah gadang dan warisan sejarah PDRI. Mengingat banyaknya potensi yang ada di Kampuang Sarugo, maka pada November 2019, pemerintah kabupaten menetapkan Wisata Sarugo sebagai Smart Branding Kabupaten Lima Puluh Kota.

Fase ketiga, penguatan kelembagaan dan pengakuan nasional (2021). Tahun 2021 menjadi tahun krusial bagi Kampuang Sarugo. Kampung Sarugo dengan meraih juara 2 dalam ajang Anugerah Pesona

Indonesia (API). Tropi dan piagam untuk Kampuang Sarugo diterima oleh Bupati Lima Puluh Kota di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 20 Mei 2021. Upaya kolektif masyarakat dan Pokdarwis juga menghasilkan pengakuan nasional dengan terpilihnya Kampuang Sarugo sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kategori homestay yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keberhasilan ini tidak hanya mendongkrak popularitas desa, tetapi juga memicu dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Bantuan dari Kemenparekraf mulai mengalir untuk perbaikan infrastruktur, termasuk peningkatan kualitas aksesibilitas dan fasilitas pendukung seperti homestay, yang menjadi salah satu kategori unggulan kampung ini.

Fase keempat, inovasi, diversifikasi, dan kolaborasi berkelanjutan (2022–sekarang). Setelah meraih pengakuan nasional, Kampuang Sarugo memasuki tahap inovasi dan diversifikasi. Strategi tidak lagi hanya berfokus pada daya tarik budaya, tetapi juga merambah ke agrowisata dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Meskipun tantangan pada perkebunan jeruk masih ada, masyarakat mulai berinovasi dengan mengembangkan produk olahan jeruk dan pertanian lain, serta menciptakan paket wisata edukasi tentang pertanian. Kolaborasi dengan pemerintah nagari, dinas pariwisata kabupaten, hingga lembaga non-pemerintah diperkuat untuk mengatasi berbagai kendala, seperti promosi atraksi, perbaikan fasilitas, dan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023, bantuan dari Kemenparekraf melalui program Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPUP) semakin mempercepat kemajuan desa.

Fase kelima, pengakuan internasional dan pembentukan smart branding (2025). Puncak dari proses pengembangan yang kompleks ini terjadi pada awal tahun 2025, saat Kampuang Sarugo dianugerahi ASEAN Tourism Award. Penghargaan internasional ini menjadi validasi atas konsistensi dan keberhasilan desa dalam mengelola pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa kampung ini bukan hanya destinasi wisata, melainkan juga representasi identitas daerah, yang mengintegrasikan kearifan lokal, sejarah, dan inovasi dalam satu ekosistem pariwisata yang kokoh.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan, Kampuang Sarugo menerima total 2.209 orang pengunjung. Sebagian besar wisatawan berasal dari wilayah Sumatera Barat, yaitu sebanyak 1.928 orang, yang menunjukkan bahwa Kampuang Sarugo masih menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan lokal. Tingginya jumlah pengunjung lokal ini menandakan bahwa daya tarik budaya, alam, dan konsep desa wisata masih sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Selain wisatawan domestik dalam provinsi, Kampuang Sarugo juga dikunjungi oleh wisatawan dari beberapa provinsi lain di Indonesia, seperti Riau 183 orang, Medan 37 orang, Jakarta 27 orang, Jambi 13 orang, dan Jawa Barat 11 orang. Jumlah kunjungan dari luar provinsi yang cukup variatif ini menunjukkan bahwa Kampuang Sarugo mulai dikenal secara lebih luas di tingkat nasional, meskipun jumlahnya belum sebesar kunjungan lokal. Kampuang Sarugo juga menerima pengunjung dari mancanegara dengan total 10 wisatawan asing, yaitu dari Finlandia 2 orang, Belanda 4 orang dan Malaysia 4 orang. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil, kunjungan wisatawan internasional memberikan gambaran bahwa Kampuang Sarugo berpeluang berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga secara internasional.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan, Kampuang Sarugo tahun 2024 menerima total 878 orang pengunjung. Dari Provinsi Sumatera Barat sebanyak 720 orang. Selain wisatawan dari Sumatera Barat, jumlah pengunjung dari Provinsi Riau mencapai 70 orang, diikuti oleh wisatawan dari Bengkulu 22 orang, Jakarta 17 orang serta Batam 5 orang. Kunjungan dari beberapa provinsi lain seperti Jawa Timur 3 orang, Lampung 3 orang, Kalimantan Timur 1 orang dan Sumatera Selatan 2 orang menunjukkan bahwa Kampuang Sarugo mulai dikenal di kalangan wisatawan luar provinsi, meskipun jumlahnya belum signifikan. Selain wisatawan domestik, Kampuang Sarugo juga dikunjungi oleh 35 wisatawan

mancanegara, yaitu dari Spanyol 5 orang, Prancis 2 orang dan Malaysia 28 orang. Kunjungan wisatawan internasional yang cukup beragam ini menunjukkan bahwa Kampuang Sarugo memiliki daya tarik global. Tingginya jumlah pengunjung dari Malaysia mengindikasikan kedekatan budaya dan persepsi positif masyarakat Malaysia terhadap destinasi wisata berbasis adat di Sumatera Barat.

Jumlah pengunjung Kampuang Sarugo pada tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang masih menyebabkan perjalanan menuju lokasi kurang nyaman, sehingga menurunkan minat wisatawan. Selain itu, intensitas promosi dan kegiatan pariwisata pada tahun 2024 tidak seaktif tahun sebelumnya, sehingga daya tarik dan eksposur Kampuang Sarugo mengalami penurunan.

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata di Kampuang Sarugo, seperti kualitas sumber daya manusia masih rendah dan generasi muda belum sepenuhnya menyadari pentingnya memahami tradisi kampung yang ada. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampuang Sarugo. Saat ini, hanya ada satu kelompok sadar wisata yang membantu pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata ini. Selain itu, komponen unsur pariwisata di Kampuang Sarugo masih terbatas, akses menuju tempat wisata ini masih kurang memadai, dan belum ada agen perjalanan, perusahaan angkutan wisata, atau restoran. Selain itu, belum ada upaya yang cukup dari masyarakat dan pemerintah setempat untuk menyebarluaskan informasi mengenai tempat wisata dan pengembangan UMKM di sekitar desa wisata, yang dapat memberikan nilai tambah terhadap sektor pariwisata ini (Nisa, 2024).

Pengembangan desa wisata di berbagai daerah Indonesia telah banyak diteliti menggunakan perspektif Community Based Tourism (CBT). Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, pengelolaan potensi budaya dan lingkungan, serta dukungan kelembagaan. Temuan-temuan tersebut relevan ketika dikaitkan dengan kondisi desa-desa wisata di Sumatera Barat, termasuk Kampuang Sarugo.

Sari (2020) meneliti pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul dengan pendekatan CBT berdasarkan teori Suansri (2003), mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seluruh aspek tersebut mendukung pengembangan desa wisata, meskipun pertukaran budaya antarwisatawan dan masyarakat masih terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian budaya lokal, sebagaimana tampak pula pada desa-desa wisata di Sumatera Barat seperti Nagari Tuo Pariangan dan Desa Madobak Mentawai yang mempertahankan tradisi dan adat setempat.

Juardi et al. (2020) juga menunjukkan bahwa potensi wisata Desa Bukit Telago sangat menjanjikan, namun pemanfaatannya baru dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tinggal dekat kawasan wisata. Temuan ini menguatkan bahwa peran aktif masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan desa wisata, yang juga tercermin pada Kampuang Sarugo di mana masyarakat lokal memelihara adat Minangkabau, menjalankan nilai budaya, serta melestarikan seni seperti randai dan talempong pacik.

Penelitian Aprilia & Idialis (2023) terkait pengelolaan daya tarik wisata Pantai Lon Malang menunjukkan bahwa CBT sudah diterapkan melalui pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan hingga evaluasi, serta melalui peran lembaga lokal seperti LSM dan BUMDes. Temuan ini relevan dengan kondisi Kampuang Sarugo yang juga berkembang berkat kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah daerah, Pokdarwis, serta dukungan akademisi seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sejak 2019.

Sementara itu, Ahsani et al. (2018) menemukan bahwa faktor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik saling mendukung dalam mewujudkan kemandirian Desa Wisata Candirejo Borobudur. Hal serupa terlihat pada Kampuang Sarugo, di mana pengembangan wisata tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan peluang homestay,

tetapi juga memperkuat identitas budaya Minangkabau serta konservasi adat melalui keberadaan Rumah Gadang.

Penelitian Purmada et al. (2016) menjelaskan bahwa penerapan CBT di Desa Wisata Gubugklakah berjalan baik melalui pelestarian alam dan budaya, keikutsertaan masyarakat, serta pemerataan pendapatan. Tingkat partisipasi masyarakat bahkan mencapai tingkat *citizen control*. Temuan ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang ditekankan dalam Permenparekraf No. 9 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus berorientasi pada keberlanjutan, pemerataan ekonomi, dan pelibatan masyarakat.

Ketika dikaitkan dengan kondisi Sumatera Barat, desa-desa wisata seperti Alahan Panjang, Nagari Tuo Pariangan, Painan, dan Desa Madobak menunjukkan kekuatan alam, budaya, dan sejarah yang menjadi dasar kuat bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kampuang Sarugo sendiri memiliki kekayaan budaya yang masih terjaga, potensi alam perbukitan yang indah, serta warisan sejarah PDRI (Sindonews, 2020). Selain itu, pengembangan desa ini dilakukan melalui fase yang mirip dengan model CBT, yaitu inisiasi komunitas, penguatan lembaga lokal, serta kolaborasi multipihak.

Dengan demikian, penelitian terdahulu memberikan landasan teoretis dan empiris bahwa pengembangan desa wisata yang efektif seperti Kampuang Sarugo harus berbasis partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, pemanfaatan potensi lokal, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan agar proses pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan desa wisata itu sendiri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat eksplanatif, yang bertujuan memahami secara mendalam realitas sosial serta menjelaskan hubungan sebab-akibat dari fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fakta, persepsi, dan pengalaman masyarakat secara langsung di lapangan, sementara sifat eksplanatif membantu peneliti menelusuri alasan mengapa suatu kondisi terjadi berdasarkan konteks sosialnya.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis Community Based Tourism (CBT) di Kampuang Sarugo (Saribu Gonjong), yang berada di Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Kawasan ini dipilih karena memiliki karakter sosial budaya yang kuat dan aktivitas kelembagaan pariwisata yang aktif melalui Pokdarwis, sehingga relevan sebagai objek untuk memahami praktik pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata. Informan utama terdiri dari Kepala Jorong, Ketua Pokdarwis, serta masyarakat yang aktif dalam kegiatan wisata seperti pemilik homestay, pelaku usaha kuliner, dan tokoh adat. Mereka menjadi sumber utama dalam menggali informasi terkait aktivitas wisata, peran masyarakat, serta dinamika sosial dan kelembagaan di Kampuang Sarugo.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di kawasan wisata, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku, jurnal, laporan resmi Pokdarwis, data kunjungan wisatawan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi fisik kawasan, aktivitas wisata, interaksi masyarakat dengan wisatawan,

serta pola pengelolaan Pokdarwis. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan melalui bukti visual dan dokumen tertulis.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan merangkum, mengkode, dan mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks atau uraian yang memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan bersamaan dengan verifikasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Pariwisata Kampuang Sarugo (Saribu Gonjong) Dalam Perspektif Community Based Tourism (CBT)

1. Mendapat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat di Kampuang Sarugo menjadi fondasi utama dalam pengembangan pariwisata berbasis Community Based Tourism (CBT). Antusiasme, kepedulian budaya, dan komitmen kolektif masyarakat terlihat nyata melalui keterlibatan aktif mereka dalam berbagai kegiatan pengembangan wisata. Hal ini terbukti dari peran Pokdarwis Kampuang Sarugo, yang bahkan berhasil meraih Juara 1 Pokdarwis Terbaik Sumatera Barat tahun 2022. Keterlibatan masyarakat terwujud dalam seluruh tahap pengembangan pariwisata, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pembangunan fasilitas wisata serta pelayanan kepada pengunjung.

Dalam tahap perencanaan, pelibatan masyarakat dilakukan secara terbuka melalui musyawarah di balai jorong. Kepala Jorong menjelaskan bahwa sejak munculnya ide pengembangan pariwisata di Kampuang Sarugo, seluruh warga selalu diundang untuk berdiskusi dan memberikan pendapat. Ia menegaskan bahwa, “Sejak awal ide pariwisata Kampuang Sarugo muncul, kami selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah… Semua unsur masyarakat hadir… Setelah rencana disepakati, masyarakat ikut membantu pelaksanaannya seperti bergotong royong membersihkan area wisata” (7 Mei 2025). Ketua Pokdarwis juga menyatakan bahwa gagasan pengembangan pariwisata “tumbuh dari masyarakat sendiri,” sementara lembaga hanya bertindak sebagai koordinator agar kegiatan berjalan terarah (8 Mei 2025). Pelaku usaha turut berpartisipasi melalui diskusi dan mengikuti berbagai pelatihan, seperti pengelolaan homestay dan penyajian kuliner lokal, serta mempromosikan kegiatan wisata melalui media sosial (9 Mei 2025). Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya hadir dalam perencanaan, tetapi juga aktif memberikan masukan dan bergotong royong, mencerminkan adanya sense of ownership yang kuat terhadap destinasi.

Partisipasi masyarakat juga sangat terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum musyawarah, masyarakat diberikan ruang untuk menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan wisata. Ketua Pokdarwis menyatakan bahwa, “Kami selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan… Masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka” (8 Mei 2025). Pelaku usaha pun ikut menyampaikan gagasan mengenai pelayanan wisata dan strategi promosi digital (9 Mei 2025). Warga Kampuang Sarugo mengonfirmasi bahwa mereka dapat menyampaikan persetujuan maupun keberatan terhadap rencana pemerintah desa (9 Mei 2025). Kepala Jorong menegaskan bahwa keputusan tidak pernah dibuat secara sepihak, dengan mengatakan, “Tidak ada yang diputuskan sepihak… Semua dibahas bersama masyarakat agar hasilnya bisa diterima semua pihak” (7 Mei 2025). Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal telah berjalan dengan baik,

sejalan dengan prinsip CBT yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kendali dalam pengembangan destinasi.

Pada tahap pembangunan objek wisata, partisipasi masyarakat tampak melalui kontribusi langsung terhadap pembangunan fisik dan fasilitas pendukung. Kepala Jorong menyebut bahwa, "Hampir semua fasilitas wisata dibangun dengan tenaga dan dana gotong royong… Kami tidak menunggu bantuan pemerintah" (7 Mei 2025). Pelaku usaha turut mengembangkan homestay berbasis Rumah Gonjong sebagai akomodasi yang mencerminkan identitas budaya lokal (9 Mei 2025). Ketua Pokdarwis menambahkan bahwa masyarakat bahkan bersedia menghibahkan tanah untuk area parkir dan bergotong royong membangun taman serta gazebo (8 Mei 2025). Warga Kampuang Sarugo menegaskan komitmen mereka dengan pernyataan, "Kalau ada kegiatan wisata, kami semua turun tangan… membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas, dan menata area wisata" (9 Mei 2025). Observasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh pembangunan dilakukan secara swadaya dengan memanfaatkan aset pribadi dan sumber daya lokal, mencerminkan prinsip CBT yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat Kampuang Sarugo bukan hanya simbolis, tetapi nyata dan substantif dalam semua aspek pengembangan wisata. Keterlibatan ini telah menjadi kekuatan utama yang mendorong keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis komunitas di wilayah tersebut.

2. Memberikan Manfaat Ekonomis Bagi Masyarakat Setempat

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) di Kampuang Sarugo telah memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan baru yang melengkapi mata pencarian masyarakat di sektor pertanian, tetapi juga membuka berbagai peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Dua bentuk pemanfaatan ekonomi yang paling menonjol adalah pengelolaan homestay dan usaha kuliner lokal.

Pada aspek pemanfaatan homestay, masyarakat memanfaatkan Rumah Gadang yang sebelumnya hanya digunakan untuk acara adat sebagai tempat menginap wisatawan. Kepala Jorong menjelaskan bahwa, "Homestay di Kampuang Sarugo ini dikelola langsung oleh masyarakat… Kami membuat sistem bergiliran agar setiap keluarga yang memiliki rumah gadang bisa merasakan manfaatnya" (7 Mei 2025). Sistem ini mencerminkan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan menjaga kelestarian rumah adat. Pelaku usaha juga mengonfirmasi dampak ekonomi langsung, bahwa homestay memberi tambahan pendapatan untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak, sebagaimana dinyatakan, "Dari sini kami mendapat tambahan penghasilan yang cukup lumayan… tamu merasa nyaman karena suasananya khas" (9 Mei 2025). Masyarakat umum juga merasakan hal yang sama, "Homestay ini jadi sumber rezeki baru bagi kami… perputaran uang di kampung makin terasa" (9 Mei 2025). Ketua Pokdarwis menegaskan bahwa homestay tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sarana edukasi budaya, "Wisatawan bisa belajar tentang adat, sejarah, dan kuliner khas… kami memberikan pelatihan agar standar pelayanan tetap baik" (8 Mei 2025).

Pada aspek pemanfaatan kuliner lokal, usaha kuliner menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat. Ketua Pokdarwis menyampaikan bahwa mereka membantu memasarkan makanan tradisional melalui stan dan media sosial, karena wisatawan mencari kuliner yang sulit ditemukan di kota, "Ini peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan" (8 Mei 2025). Pelaku usaha juga menceritakan bahwa penjualan meningkat pesat ketika rombongan wisatawan datang, "Saya membuka warung kecil… kalau ada wisatawan, pesanan bisa meningkat berkali-kali lipat" (9 Mei 2025). Kepala Jorong turut menekankan pentingnya kuliner tradisional sebagai daya tarik wisata, "Setiap kegiatan wisata, ibu-ibu diberi kesempatan membuka lapak kuliner… selain menambah pendapatan, ini memperkenalkan budaya kuliner Minang" (7 Mei 2025). Masyarakat umum menambahkan bahwa

berdagang kuliner saat kegiatan wisata sangat membantu kebutuhan sehari-hari, "Hasilnya memang tidak besar, tapi cukup membantu… kami senang karena merasa dihargai" (9 Mei 2025).

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa pariwisata di Kampuang Sarugo telah menciptakan manfaat ekonomi yang nyata. Homestay memperkuat ekonomi keluarga, sementara kuliner lokal menggerakkan ekonomi mikro dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk ibu-ibu. Pola ini mencerminkan prinsip dasar CBT yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pusat pengembangan pariwisata.

3. Aktivitas Kepariwisataan Melindungi Budaya Dan Lingkungan Alam

Pemeliharaan budaya menjadi elemen utama dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) di Kampuang Sarugo, karena budaya merupakan identitas sekaligus daya tarik utama desa wisata. Rumah Gadang, tradisi adat, kesenian seperti randai dan silek, serta kuliner tradisional dipertahankan bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai praktik hidup sehari-hari. Pendekatan CBT membuat pelestarian budaya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau tokoh adat, melainkan melibatkan seluruh masyarakat melalui aktivitas wisata yang tetap selaras dengan adat Minangkabau.

Pengenalan budaya dilakukan melalui interaksi langsung dengan wisatawan, bukan sekadar pertunjukan. Kepala Jorong menjelaskan, "Wisatawan biasanya kami bawa berkeliling Rumah Gadang sambil kami ceritakan sejarahnya… kami juga sering menampilkan randai atau silek kalau ada rombongan besar" (7 Mei 2025). Masyarakat juga berperan sebagai komunikator budaya, sebagaimana disampaikan salah seorang warga, "Kami jelaskan bahwa adat di sini masih dipakai… mereka senang karena bisa melihat langsung kegiatan yang sebelumnya hanya mereka lihat di internet" (9 Mei 2025). Pelaku homestay turut memperkenalkan budaya melalui aktivitas sehari-hari, "Kami jelaskan sejarah Rumah Gadang… kadang kami juga ajarkan membuat makanan tradisional seperti lamang" (9 Mei 2025). Ketua Pokdarwis menegaskan adanya alur kunjungan yang menonjolkan budaya hidup, "Kami ingin wisatawan melihat bahwa budaya kami bukan hanya ada di pertunjukan, tapi hidup dalam keseharian masyarakat" (8 Mei 2025).

Selain mengenalkan budaya, masyarakat juga berupaya melindungi produk kebudayaan agar tidak berubah akibat aktivitas wisata. Kepala Jorong menegaskan batasan ruang adat, "Ada bagian rumah yang boleh dilihat wisatawan, tetapi ada ruang sakral yang tidak bisa dimasuki… nilai adat tetap harus dihormati" (7 Mei 2025). Tokoh adat menambahkan bahwa kegiatan wisata harus mengikuti aturan adat, "Kami tidak ingin budaya hanya menjadi tontonan, tapi tetap berdiri pada nilai yang benar" (7 Mei 2025). Ketua Pokdarwis menjaga keaslian kesenian, "Kami tidak mau pertunjukan randai dan silek diubah-ubah… yang kami tampilkan adalah bentuk aslinya" (8 Mei 2025). Pelaku usaha kuliner juga mempertahankan resep tradisional, "Kami tetap menggunakan cara memasak lama agar rasanya tidak berubah" (9 Mei 2025). Masyarakat memperkuat perlindungan budaya melalui kebiasaan sehari-hari, "Cara menerima tamu, cara berbicara, sampai cara makan bersama masih mengikuti adat Minangkabau" (9 Mei 2025).

Hasil observasi memperlihatkan bahwa seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam menjaga keaslian budaya, mulai dari tata ruang Rumah Gadang yang dihormati, kesenian tradisional yang ditampilkan sesuai pakem, hingga kuliner dan interaksi sosial yang tetap mengikuti adat. Pola ini menunjukkan bahwa budaya di Kampuang Sarugo tidak hanya dipertahankan sebagai objek wisata, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat.

B. Kendala Pengembangan Pariwisata Kampuang Sarugo (Saribu Gonjong) Dalam Perspektif *Community Based Tourism (CBT)*

Dalam proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism), meskipun telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, proses pelaksanaannya masih

menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat fisik seperti akses jalan dan infrastruktur dasar, tetapi juga mencakup tantangan sosial, kultural, serta manajerial yang memengaruhi keberlanjutan pengelolaan wisata. Dalam konteks CBT, kendala ini penting dianalisis karena kualitas partisipasi masyarakat, efektivitas kelembagaan lokal, serta kesesuaian kegiatan wisata dengan nilai adat sangat menentukan keberhasilan model pariwisata yang berkelanjutan.

1. Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas

Kendala infrastruktur dan aksesibilitas menjadi hambatan awal yang paling sering muncul dalam pengembangan pariwisata Kampuang Sarugo. Sebagai destinasi yang berada di wilayah perkampungan, akses menuju lokasi masih bergantung pada kondisi jalan yang sempit, beberapa ruas yang belum beraspal, serta minimnya fasilitas pendukung seperti penerangan, area parkir memadai, dan papan petunjuk wisata.

Dalam wawancara dengan Ketua Pokdarwis Kampuang Sarugo, beliau menyampaikan bahwa :
"Kalau dari sisi Pokdarwis, hambatan utama memang pada akses. Jalannya kecil sehingga sulit mengatur arus kendaraan. Wisatawan baru sering kesulitan mencari lokasi karena papan petunjuk belum lengkap. Selain itu, beberapa titik menuju objek wisata kampung juga belum dilengkapi fasilitas seperti bangku istirahat atau jalur yang rapi, sehingga tidak sepenuhnya nyaman bagi pengunjung" (wawancara Ketua Pokdarwis Kampuang Sarugo, 8 Mei 2025).

Ketua Pokdarwis memberikan perspektif dari sisi operasional pariwisata. Ia menyoroti kesulitan mengatur arus kendaraan karena kondisi jalan yang hanya satu jalur dan kurangnya papan petunjuk menuju lokasi wisata. Hal ini berdampak pada efektivitas promosi serta kenyamanan wisatawan baru. Selain itu, minimnya fasilitas seperti area istirahat atau jalur yang rapi menuju titik-titik wisata menunjukkan bahwa destinasi belum sepenuhnya siap menerima kunjungan besar. Temuan ini memperlihatkan bahwa perbaikan infrastruktur tidak hanya menyangkut jalan, tetapi juga sarana pendukung yang memengaruhi kualitas pengalaman wisata.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan pemilik homestay di Kampuang Sarugo :
"Tamu-tamu yang datang sering bercerita bahwa mereka suka dengan suasana kampungnya, tapi perjalanannya dianggap cukup sulit. Jalannya sempit dan naik turun,. Mereka bilang akan lebih nyaman kalau akses masuk kampung bisa diperlebar atau diperbaiki" (wawancara dengan pelaku usaha Kampuang Sarugo, 9 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kondisi akses yang sulit berdampak langsung pada persepsi dan kenyamanan wisatawan. Banyak wisatawan menyatakan bahwa perjalanan menuju kampung cukup melelahkan, terutama pada jalur yang sempit dan berkelok. Hal ini dapat menurunkan minat kunjungan ulang dan memengaruhi tingkat rekomendasi dari wisatawan kepada calon pengunjung lainnya. Dengan demikian, infrastruktur yang belum memadai bukan hanya menjadi kendala teknis, tetapi juga berdampak pada potensi ekonomi masyarakat yang mengandalkan kunjungan wisata.

Berikut wawancara dengan masyarakat Kampuang Sarugo, mengemukakan bahwa :
"Kalau ramai pengunjung, sering terjadi macet kecil karena mobil tidak bisa berpapasan. Kami biasanya ikut membantu mengatur kendaraan supaya bisa lewat. Tempat parkir juga cepat penuh, jadi kendaraan banyak parkir di pinggir jalan dan itu kadang mengganggu aktivitas masyarakat" (wawancara dengan masyarakat Kampuang Sarugo, 9 Mei 2025).

Penjelasan dari masyarakat lokal menunjukkan bahwa kendala infrastruktur juga berdampak pada aktivitas harian warga. Ketika jumlah pengunjung meningkat, kemacetan kerap terjadi karena jalan tidak cukup luas untuk menampung pergerakan dua kendaraan sekaligus. Warga bahkan harus turun tangan membantu mengatur lalu lintas demi kelancaran arus wisata. Hal ini menunjukkan bahwa beban infrastruktur sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat, sehingga peningkatan akses jalan dan area parkir tidak hanya untuk wisatawan, tetapi juga kebutuhan masyarakat setempat.

Berikut wawancara dengan Kepala Jorong Kampuang Sarugo, beliau mengemukakan bahwa :
"Untuk masalah infrastruktur, memang yang paling terasa itu kondisi jalan menuju Kampuang Sarugo. Jalannya masih sempit dan beberapa bagian belum diaspal, jadi kalau musim hujan sering becek dan licin. Ini tentu berpengaruh pada kenyamanan pengunjung yang datang, apalagi kalau membawa mobil besar atau rombongan. Selain itu, penerangan jalan juga masih terbatas. Saat ada kegiatan di sore atau malam hari, akses menuju kampung jadi kurang aman. Kami di jorong sudah beberapa kali mencoba mengusulkan perbaikan ini, tapi realisasinya memang bertahap" (wawancara dengan Kepala Jorong Kampuang Sarugo, 7 Mei 2025).

Wawancara dengan Kepala Jorong menunjukkan bahwa kondisi akses jalan merupakan kendala paling signifikan dalam mendukung aktivitas wisata di Kampuang Sarugo. Pernyataannya mengenai jalan yang sempit menggambarkan bahwa infrastruktur dasar belum memadai untuk menunjang mobilitas wisatawan. Hal ini berdampak langsung pada kenyamanan pengunjung, terutama bagi rombongan yang membawa kendaraan berukuran besar. Selain itu, keterbatasan penerangan jalan juga diidentifikasi sebagai hambatan yang memengaruhi keamanan akses, terutama ketika terdapat kegiatan wisata pada sore atau malam hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur menuju Kampuang Sarugo masih menjadi hambatan utama dalam mendukung kelancaran pariwisata. Jalan menuju kampung tampak sempit, sehingga membuat perjalanan wisatawan kurang nyaman dan memerlukan kehati-hatian. Selain itu, keterbatasan penerangan jalan serta minimnya papan penunjuk arah membuat wisatawan yang baru pertama kali datang sering kesulitan menemukan lokasi tanpa bertanya kepada warga. Area parkir yang terbatas juga menyebabkan kendaraan harus diparkir di pinggir jalan ketika kunjungan membludak, yang pada akhirnya mengganggu arus lalu lintas di sekitar kampung.

Selain akses jalan, fasilitas pendukung destinasi wisata juga terlihat masih minim, tidak tersedia cukup tempat untuk beristirahat. Keterbatasan ini membuat wisatawan harus berhenti di area yang bukan diperuntukkan bagi pengunjung. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan agar Kampuang Sarugo mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih nyaman, aman, dan layak bagi pengunjung. Kendala-kendala ini menegaskan pentingnya peningkatan sarana prasarana sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Dari perspektif CBT, keterbatasan infrastruktur bukan hanya soal kenyamanan wisatawan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Ketika jalan tidak memadai, pelaku UMKM kesulitan mendistribusikan produk, dan tamu yang datang ke homestay juga terbatas. Artinya, perbaikan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga investasi sosial untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis masyarakat.

2. Kendala Sosial dan Kultural

Sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya CBT dan enggan berpartisipasi aktif. Kesenjangan partisipasi ini dapat memicu konflik sosial dalam pembagian manfaat ekonomi dan peran kelembagaan. Secara sosial dan budaya, Kampuang Sarugo merupakan kawasan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat Minangkabau. Prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah masih menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Namun, dalam konteks pengembangan pariwisata, nilai-nilai tersebut kadang mengalami gesekan dengan perilaku wisatawan yang berasal dari latar belakang budaya berbeda.

Sebagian masyarakat menilai bahwa kehadiran wisatawan dapat membawa perubahan terhadap pola interaksi sosial dan kebiasaan masyarakat lokal. Ketakutan terhadap guncangan budaya ini membuat sebagian warga enggan terlalu terbuka atau aktif dalam kegiatan pariwisata. Dalam wawancara dengan tokoh adat Kampuang Sarugo, Bapak Zulkifli Dt. Rajo Nan Putiah, beliau menjelaskan bahwa:

"Kita harus hati-hati, karena kampung ini bukan tempat hiburan, tapi nagari adat. Wisata boleh, tapi jangan sampai budaya kita rusak. Kadang ada wisatawan datang pakai baju tidak sopan, atau tidak tahu aturan masuk Rumah Gadang. Ini perlu ada sosialisasi dari Pokdarwis" (wawancara dengan tokoh adat Kampuang Sarugo, 7 Mei 2025).

Pernyataan tokoh adat menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap dampak pariwisata terhadap adat setempat. Ia menegaskan bahwa Kampuang Sarugo adalah nagari adat yang harus dijaga, sehingga perilaku wisatawan seperti cara berpakaian dan etika memasuki Rumah Gadang harus sesuai aturan. Masalah muncul ketika wisatawan tidak memahami norma lokal. Oleh karena itu, tokoh adat menilai perlu adanya sosialisasi dari Pokdarwis agar wisatawan mengetahui batasan adat sebelum berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa kendala sosial dan kultural lebih banyak berkaitan dengan perlunya edukasi dan penyesuaian antara budaya lokal dan perilaku wisatawan.

Selain persoalan nilai budaya, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan CBT juga belum merata. Masih ada sebagian warga yang memandang kegiatan wisata hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti pengelola homestay atau kelompok perempuan kuliner, akibatnya muncul kecemburuan sosial antarwarga. Menurut hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, ia menyampaikan bahwa :

"Kita sudah coba menggerakkan masyarakat supaya ikut dalam kegiatan wisata, tapi memang tidak semua bisa langsung terlibat. Ada yang mendukung penuh karena mereka merasakan manfaatnya, tapi ada juga yang masih ragu. Kadang mereka bilang takut adat berubah, atau belum paham apa sebenarnya tujuan pariwisata ini. Jadi kalau ada kunjungan besar, yang aktif membantu itu-itu saja. Ini membuat kami kesulitan untuk bagi tugas dan memastikan pelayanan maksimal karena partisipasinya tidak merata" (wawancara dengan Ketua Pokdarwis Kampuang Sarugo, 8 Mei 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kendala sosial juga berasal dari internal masyarakat. Tidak semua warga memahami tujuan jangka panjang pariwisata, sehingga partisipasi mereka tidak konsisten. Ketua Pokdarwis mengidentifikasi ketidakmerataan partisipasi ini sebagai hambatan dalam pengelolaan kunjungan wisata, terutama ketika kegiatan membutuhkan kerja sama seluruh masyarakat. Hal ini menegaskan perlunya edukasi terus menerus tentang manfaat CBT.

Kepala Jorong merupakan memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi sosial masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perkembangan pariwisata di Kampuang Sarugo. Pandangan beliau penting untuk melihat bagaimana kesiapan sosial warga dalam menerima kunjungan wisatawan serta hambatan yang muncul dalam interaksi sehari-hari. Beliau mengatakan bahwa:

"Masyarakat kita memang dikenal ramah dan terbuka, namun dalam praktiknya, tidak semua terbiasa berinteraksi dengan wisatawan. Ada yang masih merasa canggung ketika harus menyapa atau melayani tamu, terutama jika tamunya berasal dari luar Provinsi atau luar negeri. Mereka sering bingung harus mulai bicara dari mana atau bagaimana bersikap yang tepat, Jadi kalau warga belum terbiasa, pelayanan bisa terasa kurang maksimal. Ini perlu waktu dan latihan" (wawancara dengan Kepala Jorong Kampuang Sarugo, 7 Mei 2025).

Wawancara dengan Kepala Jorong tersebut menunjukkan bahwa kendala sosial yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya pengalaman dalam berinteraksi dengan wisatawan. Meskipun warga memiliki karakter ramah, tetapi rasa canggung dan minimnya kemampuan komunikasi membuat sebagian dari mereka belum percaya diri melayani tamu. Kendala ini dapat mempengaruhi kualitas interaksi dan pelayanan wisata. Kepala Jorong menekankan bahwa diperlukan pembiasaan, pendampingan, dan pelatihan sederhana agar masyarakat lebih siap menghadapi tamu dan mendukung kegiatan pariwisata secara optimal.

Wawancara dilakukan dengan salah satu pemilik homestay di Kampuang Sarugo, pemilik homestay memiliki gambaran langsung tentang kendala sosial dan kultural yang muncul selama tamu menginap, beliau mengemukakan bahwa :

"Selama ini tamu-tamu yang datang masih ada yang belum memahami adat di sini. Misalnya, ada tamu yang langsung masuk ke bagian belakang rumah tanpa izin, atau duduk di area tertentu yang hanya diperuntukkan bagi keluarga. Kami sebenarnya ingin menjelaskan, tapi kadang sungkan karena takut membuat tamu tidak nyaman. Jadi, kalau situasinya kurang enak, biasanya kami meminta bantuan Pokdarwis untuk menyampaikan aturan adat dengan cara yang lebih tepat" (wawancara dengan pelaku usaha Kampuang Sarugo, 9 Mei 2025).

Wawancara ini menunjukkan bahwa pemilik homestay berada pada posisi yang cukup sensitif karena harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan adat dan menjaga kenyamanan tamu. Ketidaktahuan wisatawan tentang batasan ruang adat sering menimbulkan situasi yang canggung, misalnya masuk ke area pribadi atau melanggar aturan tempat duduk adat. Namun pemilik homestay tidak selalu merasa bebas untuk menegur secara langsung karena khawatir dianggap tidak ramah. Hal ini menguatkan kebutuhan akan panduan atau informasi yang lebih jelas bagi wisatawan sejak awal kunjungan, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan kesalahpahaman yang dapat dicegah.

Wawancara juga dilakukan dengan salah seorang masyarakat lokal untuk melihat bagaimana warga merasakan langsung perubahan sosial yang muncul sejak adanya kunjungan wisatawan. Beliau mengatakan bahwa :

"Kalau wisatawan datang, kampung memang terasa lebih hidup. Kami senang karena banyak yang ingin melihat budaya kami. Tapi kadang ada juga yang tidak tahu kebiasaan kami di sini. Misalnya, mereka berjalan ke sekitar surau dengan pakaian yang kurang pantas, atau mengambil foto di tempat tertentu tanpa bertanya dulu. Kami bukan tidak suka, hanya saja kami punya aturan dan sopan santun sendiri. Mau memberi tahu, kadang takut mereka tersinggung. Jadinya kami diam saja, tapi sebenarnya agak khawatir juga kalau dibiarkan" ((wawancara dengan masyarakat Kampuang Sarugo, 9 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa masyarakat lokal menghadapi kendala sosial ketika wisatawan tidak memahami norma adat dan batas-batas kesopanan yang berlaku. Situasi ini menciptakan kecanggungan, terutama ketika perilaku wisatawan berpotensi melanggar aturan adat. Hal ini menegaskan perlunya mekanisme penyampaian informasi yang jelas kepada wisatawan agar masyarakat tidak menanggung beban sosial akibat kesalahpahaman budaya. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian wisatawan belum memahami aturan adat di Kampuang Sarugo, seperti batasan area yang boleh dimasuki, cara berpakaian, dan etika saat berada di Rumah Gadang serta lingkungan adat lainnya. Beberapa pengunjung terlihat mengambil foto atau berjalan ke area tertentu tanpa izin, yang membuat masyarakat tampak canggung namun tidak berani menegur secara langsung.

Selain itu, interaksi antara warga dan wisatawan belum sepenuhnya cair. Beberapa masyarakat terlihat ragu untuk memberikan arahan atau menyapa tamu terlebih dahulu, karena khawatir menimbulkan kesalahpahaman. Observasi juga memperlihatkan bahwa tidak semua warga terlibat aktif dalam kegiatan wisata, sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih berbeda-beda. Secara keseluruhan, kendala utama terlihat dari ketidaksiapan sosial masyarakat dan kurangnya pemahaman wisatawan terhadap adat lokal.

3. Kendala Manajerial dan Kapasitas SDM

Kendala manajerial dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi efektivitas pengelolaan pariwisata Kampuang Sarugo. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) menuntut adanya kemampuan perencanaan, koordinasi, dan pengorganisasian yang baik dari seluruh pihak yang terlibat. Namun masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam aspek manajerial, seperti pengaturan jadwal, pembagian tugas, pencatatan administrasi, serta konsistensi pelaksanaan program. Selain itu, kapasitas SDM dalam pelayanan wisata, komunikasi dengan pengunjung, hingga pemahaman mengenai standar operasional pariwisata masih belum merata.

Keterbatasan ini menyebabkan kegiatan pariwisata belum sepenuhnya berjalan secara terstruktur dan profesional. Pelayanan wisata yang ideal memerlukan keterampilan teknis dan non-teknis, seperti kemampuan menjadi pemandu wisata, mengelola homestay, menyambut tamu, hingga menyampaikan informasi budaya secara tepat. Namun, sebagian masyarakat masih belajar secara bertahap dan belum terbiasa dengan tuntutan kerja pariwisata. Hal ini diakui oleh Ketua Pokdarwis :

"Kami sudah berusaha menyusun kegiatan dan pembagian tugas, tapi karena anggotanya masih belum semua memiliki pengalaman, sering terjadi miskomunikasi. Kadang ada kegiatan yang harusnya ditangani bersama, tetapi hanya dikerjakan oleh beberapa orang saja. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam hal pelayanan wisata, seperti menjadi pemandu atau mengelola kegiatan, juga masih perlu ditingkatkan" (wawancara dengan Ketua Pokdarwis Kampuang Sarugo, 8 Mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kendala manajerial muncul dari kurangnya pengalaman dan keterampilan anggota Pokdarwis dalam mengelola kegiatan wisata. Koordinasi yang belum optimal menyebabkan beberapa pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana, sehingga pelayanan wisata tidak maksimal. Setiap tahun atau dua tahun sekali terjadi pergantian pengurus, yang menyebabkan hilangnya kesinambungan program. Program pelatihan atau promosi yang sudah dirintis kadang tidak dilanjutkan oleh pengurus baru karena kurangnya dokumentasi dan koordinasi. Diperlukan pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM agar pengelolaan wisata dapat berlangsung lebih profesional. Kepala Jorong Kampuang Sarugo menambahkan :

"Kadang kami mengalami kesulitan dalam menyelaraskan jadwal antara kegiatan jorong dan kegiatan wisata. Tidak semua anggota Pokdarwis bisa hadir dalam rapat, dan ini membuat informasi tidak tersampaikan merata. Selain itu, pencatatan administrasi kegiatan wisata juga belum rapi, sehingga sulit memantau perkembangan secara jelas" (wawancara dengan Kepala Jorong Kampuang Sarugo, 7 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara dengan menunjukkan bahwa kendala manajerial tidak hanya terkait kemampuan masyarakat, tetapi juga menyangkut kelancaran komunikasi dan administrasi. Ketidakhadiran anggota dalam rapat serta pencatatan kegiatan yang belum tertata membuat koordinasi antara pemerintah jorong dan pengelola wisata belum menyatu. Beberapa pelaku usaha menyatakan kekhawatiran mereka, pemilik salah satu homestay dan usaha kuliner, menuturkan bahwa :

"Kalau tamu datangnya sedikit, biasanya kami bisa melayani dengan baik. Tapi kalau rombongan besar, kami sering kewalahan. Persiapan harus cepat, sementara tenaga dan peralatan kami terbatas. Kadang kami juga bingung mengikuti standar pelayanan wisata itu seperti apa, karena selama ini belajar dari pengalaman saja. Jadi kalau ada permintaan khusus dari tamu, kami tidak selalu siap" (wawancara dengan pelaku usaha Kampuang Sarugo, 9 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha menghadapi keterbatasan dalam hal kesiapan dan kemampuan melayani wisatawan, terutama ketika kunjungan berlangsung dalam jumlah besar. Keterbatasan tenaga, fasilitas, dan minimnya pemahaman mengenai standar pelayanan wisata menyebabkan layanan belum konsisten. Pelaku usaha juga masih mengandalkan pengalaman pribadi tanpa pelatihan formal, sehingga kemampuan manajerial dan pelayanan belum sepenuhnya berkembang. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan teknis sangat dibutuhkan agar pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dengan lebih profesional.

Berikut wawancara dengan masyarakat Kampuang Sarugo, yang mengemukakan bahwa :

"Kami sebenarnya ingin ikut membantu kalau ada kegiatan wisata, tapi kadang tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau ada kunjungan besar, kami menunggu pengarahan dulu dari Pokdarwis karena belum paham apa saja tugas yang bisa kami kerjakan. Ada juga kegiatan yang butuh keterampilan tertentu, sementara kami belum pernah dilatih langsung. Jadi kalau tidak diarahkan, kami takut salah atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan" (wawancara dengan masyarakat Kampuang Sarugo, 9 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa masyarakat lokal menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas SDM dan kemampuan manajerial, masih banyak yang belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran yang harus mereka jalankan dalam kegiatan pariwisata, sehingga sering menunggu instruksi dari Pokdarwis sebelum bertindak. Kurangnya pelatihan dan pengalaman membuat masyarakat merasa ragu untuk mengambil inisiatif, karena takut melakukan kesalahan dalam pelayanan. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan pembagian peran yang lebih jelas sangat diperlukan untuk mendukung keterlibatan masyarakat secara lebih mandiri dan efektif.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kampuang Sarugo masih menghadapi berbagai kendala manajerial, terutama terkait koordinasi, pembagian tugas, dan pelaksanaan kegiatan wisata. Beberapa kegiatan pariwisata tampak berjalan secara spontan dan belum terstruktur, serta masih bergantung kepada beberapa anggota Pokdarwis yang aktif. Pada saat kunjungan wisatawan berlangsung, koordinasi antara Pokdarwis, masyarakat, dan pelaku usaha belum berlangsung seragam. Ada kegiatan yang tidak tersampaikan merata kepada anggota, sehingga hanya sebagian orang yang bergerak sementara lainnya menunggu arahan. Hal serupa terjadi pada aspek administrasi, dokumentasi kegiatan dan pencatatan pengunjung belum dilakukan secara konsisten sehingga menyulitkan evaluasi operasional.

Di sisi kapasitas SDM, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk pelaku usaha, masih beradaptasi dengan tuntutan pelayanan. Ketika menerima kunjungan dalam jumlah besar, beberapa pelaku usaha tampak kewalahan dan belum mampu menyesuaikan standar pelayanan secara konsisten. Masyarakat yang ingin terlibat pun terlihat ragu dalam mengambil inisiatif karena merasa belum memiliki keterampilan atau pemahaman yang cukup mengenai tugas dan peran mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan pelayanan wisata, manajemen kegiatan, dan komunikasi sangat dibutuhkan agar masyarakat mampu terlibat secara mandiri, terorganisir, dan profesional dalam pengelolaan wisata Kampuang Sarugo.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan pariwisata Kampuang Sarugo (Saribu Gonjong) dalam perspektif Community Based Tourism (CBT) di Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengembangan pariwisata Kampuang Sarugo sudah sesuai dengan konsep Community Based Tourism (CBT), dimana masyarakat Kampuang Sarugo menjadi subjek utama dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui partisipasi dalam perencanaan kegiatan wisata, penyediaan layanan homestay dan kuliner, hingga pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Minangkabau. Prinsip dasar CBT, yaitu menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penerima manfaat utama, telah berjalan meski dengan tingkat keterlibatan yang masih bervariasi antar kelompok warga. Pariwisata juga terbukti memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kampuang Sarugo melalui usaha-usaha kecil yang tumbuh sebagai respon terhadap kebutuhan wisatawan. Selain aspek ekonomi, penguatan budaya juga menjadi hasil penting dari penerapan CBT, karena aktivitas wisata yang ada mendorong masyarakat untuk mempertahankan adat, tradisi, serta warisan budaya seperti Rumah Gadang, tata krama adat, dan aktivitas tradisional lainnya.
2. Kendala pengembangan pariwisata di Kampuang Sarugo terutama terlihat dari kondisi infrastruktur dan fasilitas wisata yang masih terbatas, sehingga belum mampu mendukung kenyamanan serta kebutuhan aktivitas pariwisata yang lebih besar. Selain itu, aspek sosial dan

kultural juga menjadi tantangan karena masih terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat dan wisatawan mengenai norma adat Minangkabau, sementara sebagian masyarakat sendiri belum sepenuhnya memahami peran mereka dalam pariwisata berbasis masyarakat. Situasi ini memunculkan kecanggungan dalam interaksi dan potensi gesekan nilai budaya. Di sisi lain, pengelolaan wisata masih terkendala oleh kapasitas manajerial dan keterampilan SDM yang belum merata. Koordinasi internal belum konsisten, pembagian tugas belum jelas, dan administrasi kegiatan wisata masih perlu diperkuat. Keterampilan pelayanan seperti menerima tamu, mengelola kegiatan, dan komunikasi wisata juga masih memerlukan peningkatan melalui pelatihan dan pendampingan. Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi masyarakat, dan perbaikan sarana prasarana agar pengembangan pariwisata Kampuang Sarugo dapat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pengembangan Community Based Tourism (CBT), disarankan agar masyarakat Kampuang Sarugo mendapatkan pendampingan berkelanjutan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip CBT secara lebih merata. Penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan melalui pelatihan manajemen pariwisata, pelayanan tamu, pengelolaan homestay dan kuliner, serta peningkatan kesadaran budaya. Pokdarwis dan pemerintah nagari diharapkan dapat menyusun rencana pengembangan jangka panjang yang melibatkan seluruh unsur masyarakat agar partisipasi tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu. Selain itu, promosi dan branding pariwisata perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan media digital, agar Kampuang Sarugo dapat dikenal lebih luas tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Penguatan kelembagaan, peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, serta diversifikasi produk wisata juga menjadi langkah penting untuk memastikan pariwisata berbasis masyarakat dapat berjalan secara profesional.
2. Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan akses jalan, penataan fasilitas publik, dan penyediaan informasi wisata yang jelas bagi pengunjung. Kendala sosial dan kultural dapat diminimalkan dengan menyediakan edukasi bagi wisatawan mengenai tata krama adat Minangkabau, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran mereka dalam kegiatan wisata. Sementara itu, kendala manajerial dan kapasitas SDM membutuhkan pembenahan sistem tata kelola, seperti pembagian tugas yang lebih jelas, koordinasi internal yang lebih teratur, dan administrasi yang terdokumentasi baik. Pelatihan teknis maupun non-teknis sangat penting untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pelayanan wisata. Dengan dukungan infrastruktur, penguatan koordinasi, serta peningkatan kemampuan masyarakat, kendala dalam pengembangan pariwisata dapat diminimalisir sehingga Kampuang Sarugo dapat berkembang sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). *Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa.* Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2).

[2]. Amerta, I. M. S. (2017). *Community Based Tourism Development*. International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH), 1(3), 97.

[3]. Anam, Muhammad Shofikhul. 2019. *Penerapan Konsep Community Based Tourism Pada Suistanable Tourism Dalam Menunjang Pendapata Asli Desa (Studi Kasus Pada Wisata Sumber Biru Wonosalam).*

[4]. Anwar, R. K., Hadia, M. S. D., Hendarmawan, & Khadijah, U. L. S. (2021). *Community Participation In Environmental Management At Jatiluhur Reservoir Tourism Site, Indonesia. Procedia Environmental Science, Engineering and Management*, 8(2), 363–370.

[5]. Aprilia, T. U., & Idialis, A. R. (2023). *Penerapan Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang.* Jurnal Destinasi Pariwisata, 10(2), 190.

[6]. Asyari, H. 2010. *Buku Pegangan Desa Wisata*. Yogyakarta: Tourista.

[7]. Febriandhika, Ikke, and Teguh Kurniawan. 2019. *Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community Based Tourism :* Sebuah Review Literatur." JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 3(2): 50.

[8]. Geogra, F., & Gadjah, À. U. (2013). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. Jurnal Kawistara,* 3(2), 129–139.

[9]. Hanafi, A., & As'ari, H. (2023). *Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Danau Meduyan di Kabupaten Indragiri Hulu*. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur.

[10]. Herdiana, D. (2019). *Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA),* 6, 63.

[11]. I Wayan Pantiyasa. (2011). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal. Kota Denpasar.

[12]. Juardi, J., Handani, D., & Sari, S. N. (2020). *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Desa Bukit Telago Dalam Perspektif Community Based Tourism*. Destinesia : Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata, 1(2), 81–88.

[13]. Kreatif, K. P. D. E. (2020). *Buku Panduan Penyusun Diterbitkan oleh Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Retrieved*.

[14]. Lee, Tsung Hung, and Fen Hauh Jan. 2019. *Can Community-Based Tourism Contribute to Sustainable Development? Evidence from Residents' Perceptions of the Sustainability.* Tourism Management 70 (September 2018) : 368-80.

[15]. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

[16]. Pitana I Gede, dkk. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Rafsanjani.Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(2). https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270

[17]. Purmada, D. K., Wilopo, W., & ... (2016). Pengelolaan desa wisata dalam perspektif community based tourism (studi kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten *J. Adm. Bisnis*, *32*(2), 15–22.

[18]. Rafi, F., & Herdiansyah, H. (2020). The impact of koja cliff development on social cultural and economic: Case of community-based tourism, Banten, Indonesia. Geojournal of Tourism and

Geosites, 28(1), 164–174.
[19]. Rusudi, Siregar. 2001. *Bentuk - Bentuk Partisipasi Pengembangan*. Balai Pustaka Jakarta.
[20]. Sari, N. P. R. (2015). *Penerapan Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Taro Kecamatan Tegallalang ,Gianyar Bali.* Kepariwsataan.
[21]. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
[22]. Susfenti, N. E. M. (2016). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Sukajadi*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
[23]. Wiwin, I. W. (2018). *Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali.* Pariwisata Budaya, 3(1), 69–75
[24]. Yuliani, R., & Abdi, M. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kampung Saribu Rumah Gonjong*. Jurnal Menara Ilmu Vol. XV, Sumatera Barat : Universitas Muhammadiyah.